

# LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Metodologi dan  
Informasi Statistik

---

2025



BADAN PUSAT STATISTIK



# LAPORAN KINERJA

**Deputi Bidang Metodologi dan  
Informasi Statistik**

---

**2025**

# Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2025

**No. Publikasi:**

**Katalog:** 1202063

**Ukuran Buku:** 21 x 29,7 cm

**Jumlah Halaman:** xv+73 halaman

**Naskah:**

Tim Penyusun SAKIP Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

**Penyunting:**

Tim Penyusun SAKIP Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

**Desain Kover:**

Tim Penyusun SAKIP Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

**Penerbit:**

© Badan Pusat Statistik

**Pencetak:**

Badan Pusat Statistik

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy selama Tahun 2025 kepada Kepala Badan Pusat Statistik. LAKIN ini disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan keseluruhan prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan di Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Laporan ini juga memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, yakni melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2025 dan memberikan rekomendasi pada tahun 2026.

Jakarta, 19 Januari 2026  
Plt. Deputy Bidang Metodologi dan  
Informasi Statistik

  
Pudji Irmartini



# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
Ringkasan Eksekutif.....	xv
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	4
1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran.....	4
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	5
1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2025.....	7
Bab 2. Perencanaan Kinerja.....	9
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik.....	11
2.2. Target Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025 – 2029.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025.....	15
2.4. Dukungan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden dan Isu Strategis Tahun 2025.....	16
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025.....	20
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja.....	23
3.1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025.....	25
3.2. Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terhadap Target Renstra Tahun 2025.....	36
3.3. Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025.....	38
3.4. Prestasi dan Inovasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.....	44

3.5	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.....	45
Bab 4.	Penutup .....	49
4.1	Kesimpulan.....	51
4.2	Rencana Tindak Lanjut.....	51
Lampiran	.....	53

# Daftar Tabel

Tabel 1.	Total Pagu Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Menurut Unit Kerja Eselon II Tahun 2025 .....	5
Tabel 2.	Target Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.....	15
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang MIS, 2025 .....	16
Tabel 4.	Rencana Kerja dan Anggaran PAGU total dan PAGU yang dapat digunakan Tahun 2025 .....	20
Tabel 5.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per sasaran .....	26
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral.....	27
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Literasi Pengguna Data BPS.....	28
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik.....	30
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terhadap Target Rencana Strategis .....	37
Tabel 10.	Capaian Kinerja, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.....	46



# Daftar Gambar

Gambar 1.	Komposisi SDM Deputi Bidang MIS Menurut Tingkat Pendidikan, 2025 ...	5
Gambar 2.	Perbandingan Capaian Kinerja Total Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2023-2025.....	25
Gambar 3.	Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terhadap rata-rata Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon I Tahun 2025 .....	25



# Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Perjanian Kinerja Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik....	55
Lampiran 2.	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025 .....	59
Lampiran 3.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025.....	59
Lampiran 4.	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025 .....	60
Lampiran 5.	Lokus Pembinaan Statistik Sektorial Tingkat Kementerian /Lembaga Tahun 2025 .....	61
Lampiran 6.	Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025 .....	63
Lampiran 7.	Daftar Inovasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025 .....	66
Lampiran 8.	Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025 .....	67



# Ringkasan Eksekutif

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Laporan kinerja Deputy Bidang MIS Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Deputy Bidang MIS memiliki satu Tujuan dan tiga sasaran strategis, Dimana tiap sasaran memiliki indikator kinerja masing-masing yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Deputy Bidang MIS. Adapun tujuan penetapan kinerja Deputy Bidang MIS adalah mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien. Tujuan tersebut akan dicapai melalui tiga sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Berkualitas
2. Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik
3. Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2025 Deputy Bidang MIS menetapkan tiga sasaran strategis yang diukur melalui indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Adapun rata-rata nilai capaian kinerja triwulan 4 tahun 2025 dari IKSS Deputy Bidang MIS sebesar 102,53 persen yang menunjukkan bahwa capaian kinerja IKSS dari Deputy Bidang MIS pada Tahun 2025 telah mencapai target bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan di awal Tahun 2025. Adapun Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) untuk Deputy Bidang MIS sebesar 92,28% yang tergolong kategori BAIK berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Deputy Bidang MIS memiliki tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA dengan nilai PAGU yang dapat digunakan sebesar Rp.346.850.447.000 dan realisasinya mencapai Rp.333.265.240.362 sehingga capaian realisasi anggaran 96,08 persen. Berdasarkan rata-rata nilai capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran, maka nilai efisiensi anggaran secara keseluruhan adalah sebesar 1,06, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang MIS pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien.

Selama Tahun 2025, Deputy Bidang MIS mampu menjaga kinerja unit organisasi dengan baik dengan mendorong unit eselon II di bawahnya berkinerja dengan baik juga, hal ini ditunjukkan dari berbagai macam prestasi di antaranya:

1. Badan Pusat Statistik kembali meraih Juara 1 Kategori Website di Anugerah Media Humas 2025
2. Badan Pusat Statistik meraih juara 1 dari hasil Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025
3. Badan Pusat Statistik dapat mempertahankan ISO 9001:2025 pada *Surveillance 1* untuk cakupan *The provision of Quality Management Systems for Integrated Statistical Services in 4 types of services (Library, Statistical Consultation, Sale of Statistical Product, and Recommendation for Statistical Activity)*
4. Penilaian IKASANDI (Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi) untuk Kategori Sistem Elektronik Strategis: FASIH dengan pencapaian:
  - a. Target Nilai Kematangan Siber secara nasional adalah 2.51.  
BPS mendapatkan nilai kematangan keamanan siber 3.98, yaitu di Level 4 (dari 5) – Terkelola
  - b. Target Nilai Kematangan Persandian secara nasional adalah 2.77.  
BPS mendapatkan nilai kematangan keamanan siber 2.92, yaitu di Level 3 – Terdefinisi.
5. Pusat Data (*Data Center*) BPS telah mendapatkan sertifikasi desain Pusat Data (TCCD) Tier3 untuk menunjukkan komitmen BPS terhadap standar kelas Pusat Data Dunia serta menjamin keandalan, ketersediaan, dan redundansi layanan Pusat Data BPS.

Sedangkan pelaksanaan program Deputi Bidang MIS tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Adapun beberapa hambatan tersebut adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada keahlian tertentu seperti desain konten edukasi dan promosi statistik, keterbatasan sarana dan prasarana perangkat Teknologi Informasi (TI), dan rencana kerja kegiatan sensus dan survei yang kurang baik sehingga terjadinya permintaan tiket layanan TI yang cukup besar di suatu waktu dan beresiko mengurangi kualitas layanan. Walaupun demikian Deputi Bidang MIS telah menyusun langkah-langkah penanganan dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Hal ini menunjukkan komitmen Deputi Bidang MIS dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.



# **BAB I**

---

## **Pendahuluan**



## 1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada publik baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan. Kinerja BPS dalam melaksanakan UU No. 16 tahun 1997 diukur melalui pencapaian kinerja indikator-indikator sasaran yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pusat Statistik selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) pada awal tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Untuk menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi secara berkesinambungan, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem ini merupakan suatu instrumen yang mengukur transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang MIS sebagai penyelenggara negara. Laporan kinerja ini disusun dengan merujuk pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Laporan ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja di lingkungan Deputy Bidang MIS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja Deputy Bidang MIS Tahun 2025 tertuang hasil capaian kinerja selama tahun 2025. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Penyusunan LAKIN Deputy Bidang MIS tahun 2025 juga merupakan perwujudan kewajiban Deputy Bidang MIS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Deputy Bidang MIS di tahun yang akan datang.

## **1.2. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi**

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Deputy Bidang MIS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

### **1. Tugas**

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Deputy Bidang MIS mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang MIS menyelenggarakan fungsi:

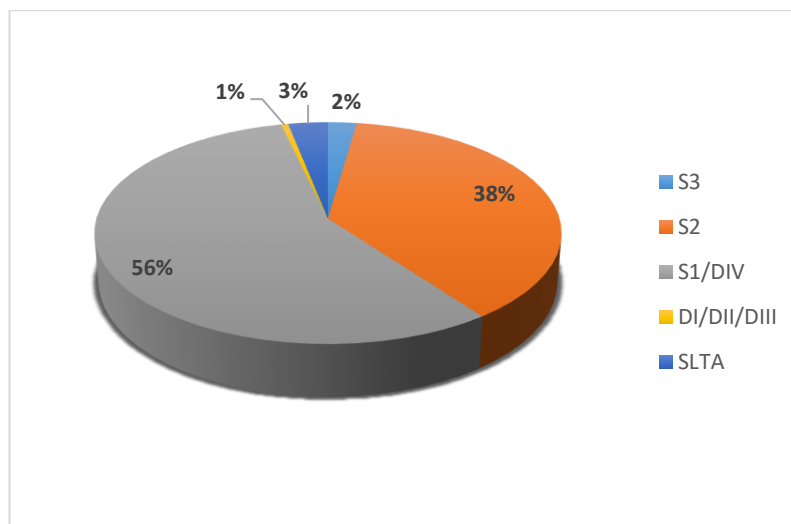
- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik,
- b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik,
- c. Pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik, dan
- d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

### **3. Susunan Organisasi**

Deputy Bidang MIS terdiri dari tiga unit kerja eselon II, yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS), Direktorat Diseminasi Statistik (DDS), dan Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS).

## **1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran**

Pada akhir tahun 2025, Sumber Daya Manusia (SDM) Deputy Bidang MIS yang terdistribusi pada Direktorat PMSS, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat SIS seluruhnya berjumlah 354 pegawai. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/ S1, yaitu mencapai 56 persen. Sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 sebesar 40 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM Deputy Bidang MIS sangat baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1. Komposisi SDM Deputi Bidang MIS Menurut Tingkat Pendidikan, 2025**

Selain dukungan SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan kinerja Deputi Bidang MIS tahun 2025 juga didukung dengan penganggaran yang sesuai. Total anggaran Deputi Bidang MIS terdistribusi ke unit kerja eselon II dibawahnya, adapun total anggaran yang dikelola Deputi Bidang MIS mengalami proses revisi anggaran selama Tahun 2025. Sehingga total anggaran Deputi Bidang MIS yang dikelola sebesar Rp.349.486.915.000,-. Besaran alokasi anggaran Deputi Bidang MIS pada tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Total Pagu Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Menurut Unit Kerja Eselon II Tahun 2025**

Kode Satker	Unit Eselon II	Pagu 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)
3100	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	1.519.292.000
3200	Direktorat Diseminasi Statistik	31.447.741.000
3300	Direktorat Sistem Informasi Statistik	316.519.882.000
<b>Jumlah</b>		<b>349.486.915.000</b>

#### 1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Deputi Bidang MIS berupaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistik dasar dan sektoral oleh internal maupun eksternal BPS. Dukungan metodologi, pengolahan data, infrastruktur TI, dan diseminasi statistik yang optimal sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistik. Potensi yang dimiliki Deputi Bidang MIS untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan antara lain:

1. Dukungan sumber daya berkualitas yang dapat dioptimalkan untuk mencapai sasaran kinerja Deputi Bidang MIS. Sebagian besar SDM di Deputi Bidang MIS adalah pegawai berpendidikan tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana TI yang cukup memadai untuk digunakan dalam pengembangan sistem dan aplikasi.
2. Peningkatan kepercayaan publik kepada BPS khususnya Deputi Bidang MIS. Hal tersebut terlihat dari peningkatan permintaan pembinaan dan kerjasama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei.
3. Peningkatan Pembinaan Statistik Sektorial Kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
4. Peningkatkan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektorial dan Khusus.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).
6. Peningkatan Penyelenggaraan Edukasi dan Promosi Statistik
7. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Statistik
8. Peningkatan Kualitas Layanan Publikasi dan Kompilasi Statistik.
9. Peningkatan Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang terstandar
10. Peningkatan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS)
11. Peningkatan Kualitas Layanan Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan program Deputi Bidang MIS terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh:

1. Keterbatasan SDM yang dimiliki
  - a. Terbatasnya jumlah SDM dan waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di beberapa kegiatan diantaranya kegiatan penyediaan metodologi sensus dan survei, kegiatan pembinaan statistik sektorial, kegiatan dalam menghasilkan konten edukasi dan promosi statistik yang baik, kegiatan penyediaan layanan konsultasi statistik, dan kegiatan untuk pengembangan FASIH.
  - b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM TI dalam hal *database*, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum TI lainnya masih tidak merata.
  - c. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektorial belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektorial.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana:
  - a. Infrastruktur TI yang mendukung tersedianya layanan TI mencakup *server*, *storage* dan perangkat jaringan di *data center* BPS sebagian besar sudah uzur dimana masa pemakaian perangkat sudah melebihi 5 tahun. Selain itu sebagian besar perangkat juga telah memasuki masa *end of support*. Jika tidak dilakukan peremajaan perangkat, maka dikhawatirkan dukungan terhadap layanan TI tidak akan berjalan maksimal.
  - b. Pemanfaatan infrastruktur TI pada pusat data nasional (PDN) sering terjadi gangguan, seperti pdn yang tidak dapat akses, data hilang, dan proses pemulihan dari gangguan yang cukup lama
  - c. Tata Kelola TI di lingkungan BPS dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan aset TIK belum optimal.

- d. Terbatasnya sarana (laptop, koneksi internet, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
3. Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI.

## 1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 2025

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik dan Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor B-82/02000/PR.630/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Kementerian PANRB dalam LAKIN Unit Kerja Pusat Tahun 2025, Laporan Kinerja Deputy Bidang MIS Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan. Pada bab ini disajikan latar belakang disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputy Bidang MIS; serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja. Pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis; Target Kinerja Deputy Bidang MIS Tahun 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang MIS Tahun 2025, dan Dukungan Deputy Bidang MIS terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, Isu Strategis Nasional Tahun 2025, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahun 2025 Pagu total serta pagu yang dapat digunakan
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini berisi Realisasi, capaian kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi tahun 2025; Perbandingan capaian kinerja total tahun 2023 sampai dengan 2025; Penjelasan Nilai PKO 2025 beserta predikat dan intepretasinya; Melakukan *Benchmarking* capaian kinerja terhadap rata-rata; Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran dari Tahun 2023 sampai Tahun 2025; Capaian Kinerja Deputy Bidang MIS terhadap Target Rencana Strategis (Renstra); Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; Prestasi dan Inovasi Deputy Bidang MIS Tahun 2025; Ralisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.
- BAB IV. Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja





# BAB II

---

## Perencanaan Kinerja



## 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan statistik dasar, mengoordinasikan statistik sektoral dan khusus, serta menjamin keterpaduan data nasional dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik juga memberi amanat pada BPS sebagai pelaksana utama statistik dasar, koordinator kegiatan statistik nasional, pembina seluruh kegiatan statistik di Indonesia, serta pusat penyebaran data statistik nasional dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, arah pembangunan Indonesia Emas 2045 adalah untuk mewujudkan Visi “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi ini diterjemahkan dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah (lima tahunan), yaitu: (1) Penguatan Transformasi pada periode 2025-2029; (2) Akselerasi Transformasi pada periode 2030-2034; (3) Ekspansi Global pada periode 2035-2039; serta (4) Perwujudan Indonesia Emas pada periode 2040-2045. Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 59 Tahun 2024, BPS sebagai lembaga negara yang mengampu urusan statistik, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Peran strategis tersebut adalah mengoordinasikan dan melaksanakan pengukuran Indikator Sasaran Visi dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

Dengan adanya visi Indonesia Emas 2045, BPS yang berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 harus menjadi lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Hal tersebut dituangkan dalam pernyataan Visi BPS 2025 – 2029 yaitu:

**“Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Sebagai lembaga yang independen, BPS menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat memengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan. Cakupan independensi ini meliputi hak otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, kebebasan dalam menentukan metodologi statistik yang merujuk pada standar internasional, serta kebebasan dalam menentukan jadwal publikasi data. Dengan independensi yang terjaga, BPS dapat membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, dan menyediakan data yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan yang akuntabel.

Sebagai lembaga yang tepercaya, BPS harus menjaga kepercayaan publik sebagai penyedia statistik berkualitas tinggi yang dihasilkan dari metodologi yang transparan dan sesuai standar sehingga dapat menjadi rujukan statistik di tingkat nasional maupun internasional. Kepercayaan ini dibangun melalui independensi dan integritas dalam pengumpulan dan analisis, konsistensi dalam penyediaan data, serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan kepercayaan yang kuat dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, BPS dapat berperan sebagai pilar utama dalam Sistem Statistik Nasional.

Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Dengan demikian, BPS dapat menjadi katalisator dalam menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, adil, dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk dapat mewujudkan Visi BPS, dirumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi BPS Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Misi ini merupakan pondasi utama dalam mewujudkan visi BPS. Data statistik yang berkualitas dan insight yang mendalam sangat dibutuhkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data. Dengan menyediakan data yang berkualitas, BPS memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan yang efektif dan terarah. Hal ini sejalan dengan Visi BPS untuk menjadi lembaga yang tepercaya dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang berkualitas juga menjadi bukti konkret dari independensi BPS karena dihasilkan melalui metodologi yang ilmiah dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Misi ini bertujuan untuk memperkuat peran BPS sebagai lembaga statistik utama di Indonesia yang mengkoordinasikan dan memimpin seluruh kegiatan statistik nasional. Dengan menguatkan kepemimpinan dalam SSN, BPS mengkoordinasi agar seluruh data yang dihasilkan oleh berbagai instansi dan lembaga di Indonesia memenuhi standar yang sama, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Hal ini mendukung Visi BPS untuk menjadi lembaga yang independen dan tepercaya karena koordinasi yang baik dalam SSN akan menciptakan data yang konsisten dan terstandar, serta memastikan transparansi dalam proses pengumpulan dan penyajian data. Selain itu, kepemimpinan yang kuat dalam SSN juga memperkuat peran aktif BPS dalam mendukung kebijakan berbasis data.

3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Keberhasilan Misi 1 dan Misi 2 membutuhkan kelembagaan yang tangguh. Untuk itu, BPS berfokus pada pengembangan SDM yang unggul, optimalisasi tata kelola organisasi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir.

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, Visi BPS sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dapat terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya:

**Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan.**

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS).

**Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien.**

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional. SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga terpercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

**Tujuan 3: Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.**

Tata kelola yang baik merupakan landasan yang mendukung kedua tujuan lainnya. Tata kelola yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien memastikan bahwa BPS mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan yang pada akhirnya memperkuat kapasitas kelembagaan. Dengan efisiensi dalam operasional dan akuntabilitas yang tinggi, BPS dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data. Indikator Kinerja pada tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden. Sementara itu, sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan**

Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan insight atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

#### Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. SSN yang baik menjadi fondasi penting bagi kebijakan publik yang berbasis bukti. Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan SSN yang terpadu, seluruh K/L/D/I mampu mendukung perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

#### Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Adapun penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang MIS sampai dengan saat Laporan Kinerja ini selesai disusun, Renstra Deputi Bidang MIS belum dapat ditetapkan secara definitif. Hal ini dikarenakan penetapan visi, misi, dan tujuan strategis pada Deputi Bidang MIS masih dalam proses penyesuaian terhadap Peraturan Badan (Perban) BPS Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025 – 2029. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi Deputi Bidang MIS tetap relevan dan mampu mendukung secara linear tujuan strategis BPS.

## 2.2. Target Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025 – 2029

Sebagai dasar menyusun perencanaan kinerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan di BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Deputi Bidang MIS menetapkan target kinerja selama kurun waktu Tahun 2025 – 2029. Adapun target kinerja Deputi Bidang MIS 2025 – 2029 disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2. Target Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Persen)				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	43,60	48,00	48,00	51,00	51,00
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien	Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik	Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	61,00	63,00	65,00	68,00	70,00
3	Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien	Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00

Masing-masing sasaran pada Tabel 2 memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

## 2.3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025

Selama periode tahun 2025 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Deputi Bidang MIS yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada subbab ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang MIS. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang

akan dievaluasi pada akhir tahun, yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang MIS, 2025**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tujuan 2</b> <b>Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien</b>			
Sasaran 2.5.0 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas	IKSS 2.5.0.1 Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	43,60
Sasaran 2.6.0 Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik	IKSS 2.6.0.1 Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	Persen	61,00
Sasaran 2.7.0 Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	IKSK 2.7.0.1 Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Persen	92,00

## 2.4. Dukungan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden dan Isu Strategis Tahun 2025

### Prioritas Nasional:

#### 1. Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan

Visi Indonesia Emas 2045 menjadi arah pembangunan jangka panjang bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Untuk memastikan visi besar ini dapat dicapai, diperlukan indikator pembangunan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, Badan Pusat Statistik (BPS) memegang peran strategis dalam penyediaan data berkualitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Peran ini memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki landasan bukti yang kuat dan tepat sasaran. Karena itu, sinergi dan kolaborasi yang matang antar instansi menjadi

prasyarat utama dalam mengimplementasikan penyediaan Indikator Sasaran Visi Indonesia Emas dan Indikator Utama Pembangunan 2045.

Sebagai pembina data nasional, BPS bertanggung jawab untuk memfasilitasi ketersediaan indikator pembangunan jangka panjang yang dapat digunakan secara konsisten di seluruh tingkatan wilayah. Secara khusus, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik memegang peranan untuk memberikan dukungan (*enabler*) terhadap Penanggungjawab Kegiatan dengan memberikan rekomendasi rancangan metodologi statistik yang sesuai dengan standar dan kebutuhan dan memberikan layanan Teknologi serta diseminasi data indikator tersebut. Salah satu tantangan penting adalah memastikan bahwa indikator yang dirumuskan sesuai dengan rencana penyusunan indikator pembangunannya.

## **2. Pembinaan Statistik Sektoral**

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Deputi Bidang MIS berperan sebagai Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral melalui Direktorat Diseminasi Statistik dan sebagai Tim Pembina di ketiga unit kerja eselon 2 di lingkungan Deputi Bidang MIS.

## **3. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi**

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang MIS. Upaya dukungan tersebut diawali dengan dalam perencanaan dan penyiapan metodologi serta penyiapan teknologi informasi untuk mendukung pendataan guna memastikan terselenggaranya kegiatan statistik harga yang mampu menghasilkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi dan andil inflasi yang akurat, konsisten dan terpercaya. Pelaksanaan pendataan dilakukan setiap bulan melalui Survei Harga Konsumen di 150 kabupaten/kota dengan cakupan periode mingguan, dwi mingguan dan bulanan, sehingga dinamika perubahan harga dapat tercatat secara komprehensif.

Selanjutnya, proses penghitungan IHK, inflasi dan andil inflasi pada tingkat nasional, 38 provinsi, dan 150 kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme harmonisasi dan rekonsiliasi antar level harga untuk menjaga konsistensi, integritas dan validitas output yang dihasilkan. Di samping itu, penguatan infrastruktur pendukung terus dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan instrumen pengumpulan data berbasis aplikasi FASIH serta penyempurnaan instrumen diseminasi guna mendukung efektivitas publikasi dan promosi data inflasi. Penjaminan kualitas dilaksanakan secara konsisten melalui evaluasi internal berupa rapat evaluasi dan penerapan Quality Gate serta evaluasi eksternal melalui mekanisme SIQAF sehingga proses dan output statistik yang dihasilkan tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

## **Prioritas Presiden**

### **1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional**

Sesuai Inpres 4/2025 tentang DTSEN, BPS mendapatkan tugas dan peran sebagai berikut:

- a. Menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi DTSEN
- b. Menerima DTSEN yang mencakup informasi BNBA dari K/L, serta melakukan integrasi data secara nasional untuk menghasilkan DTSEN sebagai rujukan utama bagi K/L dan Pemda
- c. Menyusun DTSEN yang akurat, terkini, dan terintegrasi
- d. Mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk pemutakhiran dan pengamanan data sesuai standar terbaik
- e. Menyerahkan pemanfaatan DTSEN kepada MenkoPM, Bappenas, Mensos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Melaporkan pelaksanaan integrasi DTSEN kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

Berkaitan dengan peran BPS dalam DTSEN, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik berperan penting dalam pelaksanaannya melalui Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS). Seluruh data DTSEN dikelola tim Direktorat SIS. Pengelolaan ini meliputi pepadanan data K/L melalui NIK, pemutakhiran data berdasarkan hasil pemutakhiran K/L serta melakukan integrasi data.

### **2. Makan Bergizi Gratis**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik dalam hal ini berperan melaksanakan penyusunan metodologi sampling dan penyiapan moda pencacahan FASIH serta dashboard monitoring pendataan. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan siswa yang menerima MBG. Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan petugas), tahap pematangan dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan.

### **Isu Strategis Nasional**

#### **UU Nomor 16 Tahun 1997: Sensus Ekonomi**

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhir angka enam. Sensus Ekonomi di Indonesia telah dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Adapun Sensus Ekonomi yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 merupakan Sensus Ekonomi kelima, disebut sebagai Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Tahapan kegiatan SE2026 dimulai dari kegiatan perencanaan dan persiapan pada tahun 2024 sampai dengan kegiatan penyajian dan diseminasi hasil pada tahun 2028 yang akan datang. Seperti pada kegiatan sensus sebelumnya, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik berperan dalam mempersiapkan dan menjadi bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi, diantaranya adalah:

- Penyiapan metodologi sensus
- Penyiapan prelist keluarga dan prelist usaha
- Penyiapan dasar hitung petugas
- Penyiapan aplikasi FASIH beserta monitoringnya
- Penyiapan aplikasi pengolah data
- Pelaksanaan Post Enumeration Survei
- Penyiapan diseminasi hasil

## 2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025

Pemanfaatan anggaran Deputi Bidang MIS digunakan untuk mencapai kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yaitu:

- a. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas
- b. Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik dan
- c. Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik

Pagu anggaran tahun 2025, Deputi Bidang MIS menjalankan tugas dan fungsi melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik pada awal tahun 2025 dengan anggaran pagu total sebesar Rp.308.036.749.000,-. Namun setelah adanya revisi anggaran dan menjalankan tugas dan fungsi melalui Dukungan manajemen, pagu total anggaran menjadi sebesar Rp.349.486.915.000,-. Dari total pagu tersebut, dilakukan kebijakan *self blocking* sebesar Rp2.636.468.000, sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp346.850.447.000 atau 99,25 persen dari pagu total. Pagu anggaran yang dapat digunakan ini menjadi dasar pembiayaan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Deputi Bidang MIS dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2025.

Berdasarkan sasaran strategis, pagu anggaran untuk Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.489.451.000,- dengan pengguna anggaran dari Direktorat Diseminasi Statistik. Untuk sasaran Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.30.958.290.000,- dengan pengguna anggaran dari Direktorat Diseminasi Statistik. Sedangkan untuk sasaran Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp.315.402.706.000,- dengan pengguna anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan Direktorat Sistem Informasi Statistik. Adapun rincian alokasi anggaran berdasarkan rencana kerja dari Deputi Bidang MIS Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Rencana Kerja dan Anggaran PAGU total dan PAGU yang dapat digunakan Tahun 2025**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PAGU Total (Rp)	PAGU Self Blocking (Rp)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	489.451.000	-	489.451.000

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	PAGU Total (Rp)	PAGU Self Blocking (Rp)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 2. Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik	Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	30.958.290.000	-	30.958.290.000
Sasaran 3. Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	318.039.174.000	2.636.468.000	315.402.706.000





# BAB III

---

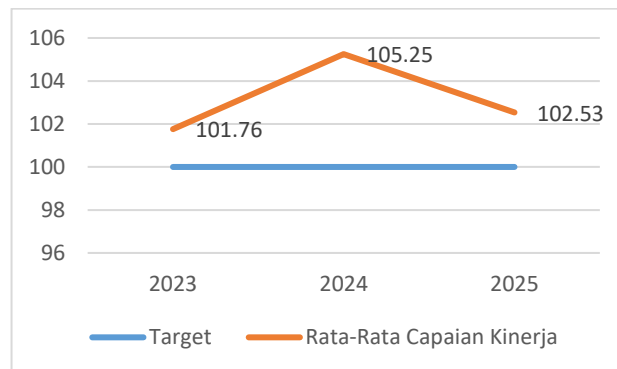
## Akuntabilitas Kinerja



## 2. Akuntabilitas Kinerja

### 3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025

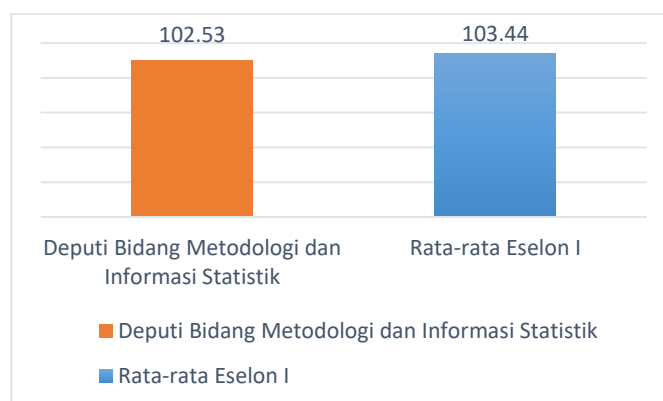
Pada Tahun 2025 terdapat perubahan jumlah Indikator Sasaran Strategis di Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik yaitu sebanyak 3 indikator, sedangkan pada Tahun 2023-2024 terdapat 4 indikator. Selanjutnya, juga terdapat penyesuaian nilai target indikator kinerja. Hal ini dikarenakan adanya perubahan rencana strategis di Tahun 2025.



**Gambar 2. Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2023-2025**

Dari hasil penghitungan rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang MIS untuk seluruh indikator kinerja sasaran dalam rentang waktu 2023-2025 sama-sama menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, yakni kinerja yang dicapai selalu melebihi target yang telah ditetapkan di awal tahun. Dimana pada Tahun 2025 rata-rata capaian kinerja Deputi Bidang MIS mencapai 102,53 persen yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 adalah peraturan tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). Peraturan ini hadir untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah tidak hanya sekadar "bekerja", tapi benar-benar mencapai hasil (*outcome*) yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pada Tahun 2025 Deputi Bidang MIS mendapatkan nilai PKO sebesar 92,28% dengan kategori BAIK, ini mengindikasikan tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Deputi Bidang MIS sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.



**Gambar 3. Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terhadap rata-rata Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon I Tahun 2025**

Perbandingan capaian kinerja Deputy Bidang MIS terhadap rata-rata capaian kinerja unit kerja eselon I BPS disajikan pada Gambar 3. Deputy Bidang MIS memiliki capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah 102,53 persen, ini berarti capaian kinerja Deputy Bidang MIS telah melebihi target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2025. Adapun rata-rata capaian kinerja diantara unit kerja eselon I sebesar 103,4 persen, hal ini juga mengindikasikan bahwa secara rata-rata setiap unit kerja eselon I di BPS memiliki capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja Deputy Bidang MIS berada dibawah rata-rata capaian kinerja eselon I. Hal ini disebabkan karena sebagian besar indikator kinerja sasara strategis Deputy Bidang MIS dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Tingkat Literasi Pengguna Data BPS. Sehingga untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2026, Deputy Bidang MIS akan melakukan beberapa upaya dengan meningkatkan kualitas pembinaan statistik sektoral kepada K/L/Pemda; meningkatkan kualitas edukasi dan promosi statistik kepada pengguna data BPS; dan meningkatkan pengembangan metodologi dan pemanfaatan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) BPS dalam proses bisnis statistik.

**Tabel 5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja per sasaran Tahun 2023-2025**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target (Persen)			Realisasi (Persen)			Capaian Kinerja (Persen)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas										100
Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		43,60	N/A (Belum dijadikan indikator)		43,60	N/A (Belum dijadikan indikator)		100
Sasaran 2. Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik										105
Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		61,00	N/A (Belum dijadikan indikator)		64,05	N/A (Belum dijadikan indikator)		105
Sasaran 3. Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik										102,59
Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		92,00	N/A (Belum dijadikan indikator)		94,38	N/A (Belum dijadikan indikator)		102,59

Pada Tahun 2025 target kinerja dari Deputy Bidang MIS berbeda dengan target kinerja tahun 2023 dan 2024, hal ini dikarenakan renstra Deputy Bidang MIS Tahun 2025 – 2029 berbeda dengan renstra 2020 – 2024. Informasi target, realisasi, dan capaian kinerja per sasaran Tahun 2023 – 2025 disajikan pada Tabel 5. Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Deputy Bidang MIS pada Tahun 2025 telah mencapai atau melebihi target yang telah ditetapkan, hal tersebut tergambar pada persentase capaian kinerja di setiap sasaran yang bernilai 100 persen atau lebih.

Persentase K/L/Pemda yang berpredikat minimal baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral merupakan indikator kinerja sasaran strategis dari sasaran program pertama. Pada Tahun 2025, BPS tidak melakukan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sehingga tidak ada penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) kepada K/L/Pemda. Sehingga target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase K/L/Pemda yang berpredikat minimal baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral merupakan realisasi capaian kinerja di Tahun 2024 yaitu sebesar 43,60 persen. Oleh karena itu, Deputy Bidang MIS pada Tahun 2025 menetapkan target sebesar 43,60 persen K/L/Pemda berpredikat minimal baik.

**Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	43,60	43,60	100

Walaupun pada Tahun 2025 BPS tidak melakukan penilaian IPS, pembinaan statistik sektoral tetap dilakukan kepada K/L/Pemda, Deputy Bidang MIS melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembinaan statistik sektoral dimana Direktorat Diseminasi Statistik sebagai sekretariat pembinaan statistik sektoral. Beberapa dukungan Deputy Bidang MIS diantaranya, menginisiasi kegiatan *kickoff* Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 kepada K/L/Pemda dan mendukung kegiatan pembinaan kepada tim Pembina statistik sektoral. Selama pelaksanaan pencapaian target indikator tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

1. Masih belum ada informasi resmi tentang kejelasan pelaksanaan EPSS 2025, sehingga memengaruhi substansi pembinaan yang diberikan
2. Perbedaan tingkat pemahaman penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L.
3. Keterbatasan SDM dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Adapun Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah

1. Koordinasi lebih intens dengan Sekretariat EPSS perihal pelaksanaan EPSS Tahun 2025.
2. Peningkatan kapasitas Tim Pembina Statistik Sektoral dan memberi layanan konsultasi kepada K/L
3. Tim pembina statistik sektoral berkolaborasi atau melibatkan tim lain dalam melakukan pembinaan di K/L

Rekomendasi perbaikan kinerja untuk Tahun 2026 diantaranya adalah

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan Sekretariat EPSS terkait EPSS, mengingat tahun 2026 akan dilaksanakan EPSS yang ketiga kalinya
2. Peningkatan kapasitas Tim Pembina Statistik Sektor melalui berbagai kegiatan seperti: Pelatihan, Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektor (ESENSIAL), dan Rapat koordinasi Tim Pembina Statistik Sektor

Tingkat Literasi Pengguna Data BPS merupakan indikator kinerja kedua dari Deputi Bidang MIS yang bertujuan meningkatkan literasi statistik pengguna data BPS. Tingkat literasi ini dibangun dari beberapa indikator yaitu:

- a. Persentase kegiatan edukasi dan promosi statistik yang terselenggara dengan baik diberikan bobot 40%
- b. Tingkat Kepuasan Konsumen (IKK) Layanan Konsultasi Statistik dengan bobot 30%
- c. Persentase pengunjung website yang mengakses konten publikasi dengan bobot 30%

**Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Literasi Pengguna Data BPS**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	Persen	61,00	64,05	105

Aktivitas Edukasi dan Promosi Statistik merupakan seluruh kegiatan yang terbuka yang diselenggarakan melalui berbagai media dengan tujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman publik terhadap produk dan layanan statistik, yang berdampak pada peningkatan akses terhadap produk dan layanan statistik BPS. Aktivitas edukasi yang dilakukan antara lain Webinar *Funtastics* merupakan webinar untuk memperkenalkan kegiatan, data, dan layanan statistik di BPS kepada masyarakat umum (pengguna data), dimana pada Tahun 2025 telah diperkenalkan kegiatan/data Survei Sosial Ekonomi nasional (SUSENAS) dan ekspor impor. Aktivitas lainnya adalah BPS menyelenggarakan kegiatan *Statistics Meets Students* (SMS) untuk menumbuhkan budaya cinta statistik di lingkungan sekolah melalui pengenalan dan pemanfaatan data secara sederhana dan edukatif, dan aktivitas promosi statistik dalam membuat infografis atau videografis yang ditampilkan pada media sosial BPS.

Aktivitas layanan konsultasi statistik merupakan layanan konsultasi yang diberikan kepada pengguna data terhadap kegiatan atau data yang dihasilkan BPS. Melalui layanan diskusi tersebut diharapkan pengguna data lebih teredukasi terhadap kegiatan atau data yang diselenggarakan oleh BPS. Aktivitas penyediaan konten publikasi pada website BPS diharapkan juga mampu memberikan edukasi dan insight kepada pengguna data BPS.

Capaian kinerja dari indikator kinerja Tingkat Literasi Pengguna Data BPS di Tahun 2025 mencapai 105%, yang berarti realisasi dari target yang ditetapkan pada indikator tersebut telah tercapai. Adapun dalam proses pencapaian target tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya adalah:

- b. Persentase kegiatan edukasi dan promosi statistik yang terselenggara dengan baik
  1. Keterbatasan waktu dan SDM, untuk menghasilkan konten promosi dan edukasi statistik yang berkualitas
  2. Terdapat kebijakan vakumnya akun medsos BPS pada April - Mei 2025
  3. Beberapa satker belum melakukan penyusunan konten promosi sesuai standard yang telah ditetapkan
- c. Tingkat kepuasan layanan konsultasi statistik
  1. Keterbatasan SDM dalam memberikan layanan konsultasi
  2. Pertanyaan pengguna data pada layanan konsultasi semakin beragam dan kompleks
  3. Penggunaan aplikasi layanan di BPS Provinsi belum optimal
- d. Persentase pengunjung website yang mengakses publikasi
  1. Permintaan konten di luar cakupan dan di luar SOP
  2. Keterbatasan *resource server* dalam mendukung website BPS
  3. Integrasi antara website dan sistem publikasi sebelumnya harus di-*trigger* secara Manual
  4. Arsitektur aplikasi belum begitu optimal sehingga masih terus diperbaiki secara bertahap
  5. Sebagian konten belum menjalani proses pembaruan rutin, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan.

Dari kendala tersebut Deputi Bidang MIS mencari strategi jalan keluar untuk mengatasinya antara lain

- a. Persentase kegiatan edukasi dan promosi statistik yang terselenggara dengan baik
  1. Manajemen waktu dan SDM yang optimal untuk menyediakan konten promosi dan edukasi statistik yang berkualitas
  2. Melakukan koordinasi dengan tim Humas RI
  3. Penyesuaian jadwal Webinar Ekspor - Impor setelah rilis
  4. Melakukan pendampingan/asistensi dalam pengisian LKE Provinsi
- b. Tingkat kepuasan layanan konsultasi statistik
  1. Manajemen SDM yang optimal untuk menyediakan layanan konsultasi statistik
  2. *Sharing Knowledge* rutin untuk petugas layanan dengan mengundang PJK agar lebih memahami substansi data dan metodologi dasar dari kegiatan statistik
  3. Koordinasi dan komunikasi dengan PIC layanan BPS Provinsi
- c. Persentase pengunjung *website* yang mengakses publikasi
  1. Penambahan jam kerja terutama terkait kebutuhan pengembangan sistem terkait *website*
  2. Berkoordinasi antara tim IT Direktorat Diseminasi Statistik dan Infrastruktur Dit. SIS, terkait permasalahan server untuk *website* BPS
  3. Penggunaan aplikasi otomatisasi seperti Airflow, untuk mengurangi pekerjaan rutin yang biasa dilakukan secara manual
  4. Penggunaan *environment devops* untuk kolaborasi pengembangan aplikasi dan deployment.
  5. Berkoordinasi dengan PJK terkait SOP dan alur kerja pengelolaan konten antar unit

Rencana perbaikan kinerja pada tahun 2026 pada indikator kinerja tersebut adalah

- a. Persentase kegiatan edukasi dan promosi statistik yang terselenggara dengan baik
  1. Merancang media sosial khusus penayangan konten promosi statistik
  2. Menyelenggarakan kegiatan edukasi statistik
- b. Tingkat kepuasan layanan konsultasi statistik
  1. *Sharing knowledge* petugas dengan PJK untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap data yang dihasilkan
  2. *Sharing knowledge* secara berkala dengan BPS Propinsi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi layanan
- c. Persentase pengunjung *website* yang mengakses publikasi
  1. Pengembangan dan Perbaikan *bugs* Sistem *Website* dan pendukungnya

Indikator kinerja ketiga Deputi Bidang MIS adalah Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik. Indikator ini menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Deputi Bidang MIS dalam menyediakan metodologi dan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dalam mendukung terciptanya proses bisnis statistik yang baik. Indikator kinerja ini dibangun dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan, yang diberi bobot 40%
- b. Persentase Pengembangan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) dengan bobot 20%
- c. Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan bobot 40%

**Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Persen	92,00	94,38	102,59

Keberhasilan Deputi Bidang MIS dalam mencapai indikator Tingkat ketersediaan metodologi kegiatan statistik yang terstandar dan terimplementasi, tidak terlepas dari keterkaitan dengan indikator lain dan juga capaian dari direktorat di bawahnya, yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS). Semua dokumen yang diselesaikan mencakup desain sampling, termasuk alokasi sampel dan pengukuran sampel dilakukan berdasarkan permintaan dari pihak luar Direktorat PMSS, baik dari internal BPS (Penanggung Jawab Kegiatan/PJK BPS) maupun dari eksternal BPS (Kementerian/ Lembaga di luar BPS). Dengan demikian, pencapaian indikator Tingkat ketersediaan metodologi kegiatan statistik yang terstandar dan terimplementasi pada tahun 2025 berhasil mencapai 105,90 persen.

Capaian kinerja Pengembangan sistem infrastruktur statistik nasional (sisnas) di Tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 persen. Adapun aplikasi yang dikembangkan di sisnas saat ini adalah aplikasi fasih, merupakan aplikasi survei dan sensus digital yang berfungsi sebagai alat pengumpulan data modern (CAPI/CAWI) menggunakan HP atau web, menggantikan kuesioner kertas, untuk mempercepat proses pendataan, menghemat biaya, dan menghasilkan data statistik yang lebih cepat tersedia

serta akurat. Pengembangan aplikasi lainnya adalah aplikasi IPAS (*Integrated Processing Analysis System*), merupakan aplikasi pemrosesan terintegrasi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai tahapan pengolahan data survei dan sensus.

Pada indikator Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada tahun 2025 ditargetkan Tingkat kepuasan layanan teknologi informasi dan komunikasi 80 persen dan capaian realisasi di akhir tahun adalah sebesar 80,04 persen. Berdasarkan capaian dari indikator pembentuk Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik, menghasilkan capaian kinerja sebesar 102,59 persen. Dalam proses pencapaian kinerja pada Tingkat pengembangan metodologi dan pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis statistik terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

a. Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan

Ketersediaan desain sensus dan survei yang andal dan dimanfaatkan pengguna lintas sektor.

- Ketidaksesuaian alokasi sampel 2026 dengan MSF baru yang berbasis SLS.
- Rancangan sampel tidak sesuai dengan kebutuhan penghitungan indikator yang akan dihasilkan.
- Terkait penyediaan sampel minimum IPlan 2027, briefing aplikasi IPlan belum optimal, sehingga berdampak pada isian permintaan sampel dan PJK yang tidak sesuai kebutuhan, dan penyesuaian mekanisme kerja dengan aplikasi baru IPlan sehingga memerlukan waktu lebih lama sehingga penetapan sampel pada saat memasuki periode input IPlan.
- Penyediaan sampel survei untuk pelaksanaan tahun 2026 terhambat karena beberapa hal, diantaranya ketersediaan master Sub-SLS terbaru dan identifikasi kebutuhan data statistik oleh PJK tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Ketersediaan kerangka sampel berkualitas dan mutakhir.

- Dalam pengambilan sampel Sakernas 2026 bersumber pada MSF baru hasil Wilkerstat SE2026 (2025 semester 1). Strata lapangan pekerjaan dihitung menggunakan master SLS (Frame) kondisi 2024 semester 2, sehingga ada ketidaksesuaian untuk SLS yang mengalami perubahan dan SLS yang dibentuk Sub-SLS baru pada 2025 semester 1.
- Ketersediaan master Sub-SLS hasil wilkerstat mundur dari jadwal yang ditentukan, sehingga berdampak rancangan sampel ubinan perlu penyesuaian saat sampel sudah harus dikirim ke daerah. *Enumeration Area* (EA) seharusnya SLS/Non-SLS/Sub-SLS, tetapi muatan hasil SLS pada Sub-SLS belum dapat tersedia secara lengkap karena peta Sub-SLS belum final.
- Adanya *Resource Limit* pada MatchaPro.
- Proses ETL tergantung kompleksitas data yang diterima, ada data yang tidak memiliki variabel provinsi dan kabupaten, sehingga harus memetakan manual dari awal dengan cara mendeteksi dari alamat yang berbentuk *text*.
- Jika jumlah data besar, kemungkinan proses manual matching yang dilakukan teman-teman juga besar.

- VPN terkadang sulit untuk terhubung (harus dimonitoring secara berkala khususnya saat *automatic matching*).
- Kurangnya SDM untuk integrasi data SBR dengan PJK BPS/Kementerian/Lembaga.
- Data dari Kementerian/Lembaga yang diterima oleh BPS tidak lengkap, seperti kode wilayah tidak sesuai, alamat tidak terisi, dll sehingga dibutuhkan preprocessing data lebih detail.

Ketersediaan publikasi/laporan klasifikasi dan standar data statistik

- Beberapa Kementerian/Lembaga masih mengajukan usulan KBLI sementara waktu usulan telah ditutup
- Beberapa perbaikan terhadap korespondensi kode KBLI 2020-KBLI 2025 dalam publikasi KBLI 2025.

Ketersediaan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.

- Adanya gap/overlap batas antarprovinsi sehingga menyebabkan peta perlu diperbaiki kembali dan di-*upload* ulang ke *Geospatial System* (GS).
- Kendala sistem (GS), yaitu proses pengecekan *error geometry* yang membutuhkan waktu yang lama dan tidak terdeteksinya error (*gap/overlap*) antarkabupaten/kota karena proses *upload* yang tidak bersamaan.
- Dokumen Lembar Kerja (LK) pengolahan noncakupan wilkerstat yang tidak standar sehingga memerlukan *cleaning* dan *preprocessing* lebih lanjut.
- Pembentukan Sub-SLS di beberapa daerah masih belum selesai hingga batas waktu yang ditentukan sebelumnya sehingga menyebabkan mundurnya pengolahan master wilkerstat semester 1 tahun 2025.
- Adanya penyesuaian aplikasi FRS-MFDOnline untuk pemuatiran wilkerstat semester 2 tahun 2025 saat pelaksanaan entri sehingga proses pemuatiran yang dilakukan oleh daerah menjadi terhambat.

Kegiatan terkait ketersediaan informasi geospasial untuk mendukung pengembangan metodologi sensus dan survei.

- Server dengan spesifikasi awal yang direncanakan untuk mendukung proses otomatisasi tidak tersedia.
- Tingginya beban kerja tim pada akhir tahun menyebabkan pelaksanaan ground check tidak dapat berjalan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan.
- Belum tersedianya media webGIS diseminasi dari BIG.
- Sistem *backend* yang tidak dapat diakses sehingga menyebabkan data tidak bisa diinput dan keterlambatan pada tersedianya webmap inflasi dari jadwal yang ditargetkan.

Pembinaan statistik bidang metodologi sensus dan survei yang dilaksanakan

- Kapasitas SDM statistik dan anggaran kegiatan survei di K/L kurang memadai, sehingga pembinaan metodologi belum dapat sepenuhnya diimplementasikan.

b. Persentase Pengembangan SISNAS

Pengembangan FASIH:

- Terdapat gangguan PDN sehingga beberapa layanan tidak dapat diakses (kurang stabil)
- Infrastruktur DC untuk pengembangan AI Fasih
- Perlu peremajaan infrastruktur yang membutuhkan migrasi dan membutuhkan downtime
- Keterbatasan SDM dalam pengembangan Fasih Ios Mobile
- Anomali pada komponen rating input (tidak muncul saat event tertentu)

Pengembangan IPAS:

- Stabilitas akses PDN
- Keterbatasan infrastruktur DC untuk IPAS
- Performa aplikasi hasil inovasi tidak sesuai ekspektasi pengguna karena perbandingan actual core dengan virtual core PDN
- Ketersediaan infra proses perhitungan node yang berat (Machine Learning dan Deep Learning)
- Dokumentasi fungsi dan formula menggunakan bahasa R dan Python
- Metadata belum tersedia

c. Tingkat kepuasan layanan TIK

- Jumlah personil tim teknis yang belum sesuai untuk menyesuaikan tiket yang masuk di tw 4 untuk layanan sistem informasi manajemen
- Belum terselenggaranya pelatihan PIC tim teknis layanan dan sosialisasi teknis terhadap pic BPS Provinsi
- Masih banyak pegawai yang tidak mengisi survei kepuasan layanan TI
- Masih terdapat tiket yang masuk di luar layanan TI (tiket yang masuk ke HaloSIS banyak yang tidak sesuai tujuan PJK)

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dicarikan Solusi penyelesaian dari kendala tersebut yaitu:

a. Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan

- Pembentukan strata lapangan usaha ulang sesuai dengan data SLS terbaru, dan selanjutnya menyusun MSF SLS ulang
- Pengecekan dan realokasi sampel sakernas 2026 sesuai ketersediaan SLS pada rekap SLS
- Menghitung sampel ulang untuk estimasi level provinsi, dan mealokasikan ulang sampel untuk estimasi level provinsi
- Dilakukan penghitungan ulang jumlah dan alokasi sampel dengan batasan anggaran yang tersedia
- Koordinasi dengan PIC PJK di luar aplikasi dan pengawasan lebih intensif kepada anggota
- Penentuan Sub-SLS terpilih oleh BPS kab/kota dan koordinasi dengan PJK melalui rapat, tindak lanjut masih menunggu komposisi anggaran
- Persentase ketersediaan kerangka sampel berkualitas dan mutakhir.
- Untuk penyediaan kerangka dan daftar sampel rumah tangga dan usaha

- Dilakukan penghitungan strata lapangan pekerjaan kembali oleh tim desain pada tingkat SLS, sehingga pada SLS yang dibentuk Sub SLS, diasumsikan strata lapangan pekerjaannya sama untuk seluruh Sub SLS di SLS tersebut.
  - Penentuan Sub-SLS terpilih oleh BPS kab/kota.
  - Koordinasi ke setiap PIC dimaksimalkan. Selain itu, tim Metodologi IBS di PMSS sementara melakukan matching secara mandiri, untuk selanjutnya diserahkan kepada tim SBR di PMSS
  - Mengarahkan BPS Daerah untuk melakukan pemutakhiran data SBR dengan sumber daya yang ada dan cara-cara inovatif.
  - Koordinasi dengan JKD SIS .
  - Memperoleh magang lulusan Politeknik Statistika STIS angkatan 63 untuk melakukan matching dan olah data.
  - Kabupaten/kota melakukan penggantian sampel dengan melihat beberapa persyaratan.
  - Konfirmasi terkait kode KBLI yang perlu perbaikan.
  - Untuk mengatasi permasalahan batas antarprovinsi dilaksanakan rekonsiliasi batas yang menghasilkan kesepakatan kedua pihak menentukan batas yang akan digunakan sehingga peta yang dihasilkan tidak lagi tumpang tindih dan beririsan antarprovinsi.
  - Pengecekan error yang lama hanya bisa menunggu selesai pengecekan karena kendala server. Untuk mendeteksi error antarkabupaten/kota hanya bisa diketahui setelah peta semua kabupaten/kota ter-upload, ke depannya perlu adanya processing secara paralel.
  - Melakukan cleaning dan preprocessing lebih lanjut agar sesuai dengan standar dan template yang telah disediakan
  - Aplikasi Sistem Pemutakhiran Wilkerstat (SiPW) dibuka kembali agar daerah dapat melakukan entri pembentukan SubSLS yang masih belum selesai
  - Melakukan koordinasi dengan tim SIS untuk progres penyesuaian aplikasi FRS-MFDOnline secara paralel.
  - Memanfaatkan server yang telah tersedia dengan melakukan sejumlah penyesuaian agar tetap dapat mendukung proses otomatisasi.
  - Berkomunikasi dengan pihak terkait baik dengan tim JKD jika diperlukan dan tim internal yang bertugas memelihara sistem untuk memulihkan kondisi backend agar sistem berjalan normal.
  - Pembagian beban tugas kepada pegawai dengan tidak memandang jenjang jabatannya namun paham dengan beban kerja yang diberikan.
- b. Persentase Pengembangan SISNAS

Pengembangan FASIH:

- Menghubungi admin PDN untuk segera solve permasalahan. Direncanakan memindahkan ke DC untuk fitur tertentu dan mayoritas fitur pada tahun depan
- Sementara menggunakan platform yang digunakan tim gen AI dan IPAS
- Berkomunikasi dengan tim Pengolahan mengenai waktu downtime yang tidak mengganggu
- Optimalisasi SDM untuk pengembangan Fasih mobile iOS

- Menyesuaikan event pada komponen rating input

Pengembangan IPAS:

- Diskusi dengan tim terkait dengan mencari alternatif solusi
- Perancangan implementasi dengan infra baru dengan tim terkait
- Melakukan optimasi resource untuk perhitungan yang membutuhkan resource besar
- Implementasi IPAS-CM (Content Management) untuk dokumentasi fungsi secara dinamis
- Koordinasi untuk pemenuhan metadata bertahap

c. Tingkat kepuasan layanan TIK

1. Launching HaloBPS pada Januari 2026
2. Legalisasi Maklumat Layanan HaloBPS
3. Pelaksanaan MoU antara unit kerja yg melakukan kerjasama dg Direktorat SIS dalam penggunaan HaloBPS
4. Pelatihan PIC tim teknis layanan HaloBPS
5. Sosialisasi HaloBPS untuk pengguna di BPS Pusat pada Januari 2026
6. Proses penyelesaian tiket tetap dilakukan. Operator HaloSIS tetap mengarahkan tiket pada Subject Matter yang seharusnya menangani kendala tersebut.

Rencana tindak lanjut untuk indikator kinerja Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik pada Tahun 2026 adalah

RTL Triwulan I Tahun 2026:

- a. Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan
  1. Merancang media sosial khusus penayangan konten promosi statistik
  2. Menyelenggarakan kegiatan edukasi statistik
- b. Persentase Pengembangan SISNAS

Pengembangan FASIH:

1. Pengembangan iOS untuk pencacah
2. Melanjutkan Fasih PAPI & Web Entry
3. Optimasi dashboard Fasih untuk mendukung SE2026
4. Mengembangkan fitur tracking untuk mendukung SE2026
5. Finishing frontend Fasih SM
6. Mengembangkan fitur untuk menghasilkan perubahan data (delta) saja pada Fasih Form

Pengembangan IPAS:

1. Pengembangan AI-agent IPAS untuk Insight Generator
2. Implementasi IPAS-CM untuk dokumentasi fungsi dan formula yang ada di IPAS-PA
3. Melakukan pengembangan anomaly detection menggunakan unsupervised learning
4. Melakukan penyesuaian resource sesuai dengan load proses di Spark

c. Tingkat kepuasan layanan TIK

1. Launching HaloBPS pada Januari 2026
2. Legalisasi Maklumat Layanan HaloBPS

3. Pelaksanaan MoU antara unit kerja yg melakukan kerjasama dg Direktorat SIS dalam penggunaan HaloBPS
4. Pelatihan PIC tim teknis layanan HaloBPS
5. Sosialisasi HaloBPS untuk pengguna di BPS Pusat pada Januari 2026

### **3.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terhadap Target Renstra Tahun 2025**

Capaian indikator kinerja pertama yaitu Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral menetapkan target Tahun 2025 sebesar 43,60 persen dan berhasil dicapai sesuai target sebesar 43,60 persen, sehingga capaian kinerja terhadap 2025 adalah 100 persen. Indikator ini menetapkan target pada Tahun 2029 sebesar 51,00 persen, yang berarti persentase K/L/Pemda yang berpredikat minimal baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral sebanyak 51%. Jika realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2029 maka capaian kinerja untuk Persentase K/L/Pemda yang berpredikat minimal baik dalam penyelenggaraan statistik sektoral sebesar 85,49 persen. Faktor utama tercapainya target untuk indikator kinerja Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah tidak adanya penilaian EPSS di Tahun 2025, dimana penetapan target pada indikator kinerja ini didasarkan pada realisasi yaitu Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Tahun 2024. Walaupun tidak ada penilaian EPSS, Deputi Bidang MIS tetap mendukung kegiatan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Beberapa hal yang dilakukan Deputi Bidang MIS adalah berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan *kickoff* pembinaan statistik sektoral, dimana peserta-nya adalah 91 K/L/yang menjadi lokus pembinaan statistik sektoral. Selain itu dukungan Deputi Bidang MIS dalam kegiatan internalisasi pembinaan statistik sektoral kepada tim pembina yang dikemas dalam kegiatan esensial (edukasi seputar pembinaan statistik sektoral).

Tingkat literasi pengguna data BPS merupakan indikator kinerja Deputi Bidang MIS yang memiliki manfaat dalam meningkatkan literasi pengguna data BPS. Pada Tahun 2025 Deputi Bidang MIS menargetkan Tingkat literasi pengguna data BPS sebesar 61 persen, pada akhir tahun Deputi Bidang MIS mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan realisasi sebesar 64,05%. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Tingkat literasi pengguna data BPS terhadap target 2025 adalah sebesar 105%. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan target renstra di Tahun 2029, capaian kinerja yang dapat dicapai adalah sebesar 91,50%. Beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian target di Tahun 2025 adalah terlaksananya kegiatan-kegiatan peningkatan literasi pengguna data BPS yang dilakukan oleh Direktorat Diseminasi Statistik diantaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan edukasi statistik berupa Webinar *Funtastics* untuk kegiatan Susenas dan ekspor Impor
2. Pelaksanaan kegiatan BPS *Goes to School* dalam *Statistics Meets Students* (SMS)
3. Penyusunan konten infografis dan videografis yang digunakan untuk kegiatan promosi statistik pada media sosial
4. Pelaksanaan internalisasi konsultasi statistik kepada petugas dan PJK, dalam memahami data-data yang disediakan untuk pengguna data

5. Perbaiki bugs dan pengembangan fitur website BPS, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna data dalam mengakses publikasi BPS

**Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terhadap Target Rencana Strategis**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target 2029	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas					100	85,49
Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	43,60	51,00	43,60	100	85,49
Sasaran 2. Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik					105	91,50
Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	Persen	61,00	70,00	64,05	105	91,50
Sasaran 3. Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik					102,59	98,32
Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Persen	92,00	96,00	94,38	102,59	98,32

Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik merupakan indikator kinerja kinerja dari Deputi Bidang MIS. Pada Tahun 2025 Deputi Bidang MIS menargetkan 92 persen pada pengembangan metodologi dan pemanfaatan teknologi informasi statistik dalam proses bisnis statistik, dimana di akhir tahun 2025 Deputi Bidang MIS mampu memberikan realisasi sebesar 94,38 persen. Sehingga capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 102,59 persen, ini berarti Deputi Bidang MIS mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan jika realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan target Tahun 2025, capaian kinerja yang dicapai sebesar 98,32 persen.

Keberhasilan Deputi Bidang MIS dalam mencapai target yang ditetapkan adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya menetapkan target penyelesaian dalam pengembangan aplikasi Fasih dan IPAS dalam SISNAS, pemantauan tiket layanan teknologi yang dikelola dan penyelesaian sesuai dengan *service level agreement* (SLA) yang telah ditentukan, dan menjaga ketersediaan metodologi kegiatan statistik yang terstandar dan terimplementasi dengan melakukan kegiatan pengembangan kapasitas SDM. Adapun kendala atau penghambat dalam mencapai target yang ditetapkan adalah

adanya perbedaan tingkat pemahaman K/L/Pemda dalam penyelenggaraan statistik sektoral, masih minimnya SDM yang memiliki keahlian dalam menyajikan konten edukasi dan promosi statistik yang berkualitas, dan kurangnya kesadaran pengguna layanan TI dalam mengisi Survei Kepuasan layanan TI.

### **3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025**

#### **a. Prioritas Nasional**

##### **1. Pembinaan Statistik Sektoral**

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Deputi Bidang Metodologi MIS melalui Direktorat Diseminasi Statistik memiliki peran dalam kaitannya dengan penyelenggaraan statistik sektoral yaitu sebagai Tim Pembina Statistik Sektoral dan Sekretariat Tim Pembina Statistik Sektoral.

##### **Output Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral**

1. Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral 2025
2. Daftar PIC/narahubung dari setiap K/L binaan untuk memastikan kelancaran koordinasi beserta data narahubung (PIC).
3. Daftar Identifikasi Kegiatan Statistik Sektoral beserta dengan 2 (dua) kegiatan statistik sektoral yang menjadi prioritas pembinaan tahun 2025 dari setiap K/L.
4. Daftar identifikasi tahapan kegiatan statistik sektoral dari setiap K/L binaan sesuai tahapan GSBPM di setiap K/L
5. Dokumentasi pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang dapat diakses pada <https://s.id/pembinaan-dds25>
6. Pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, metadata statistik, dan standar data statistik dari K/L/Pemda ke BPS
7. Sertifikat teknis maupun *Training of Trainers* (ToT) peningkatan kapasitas Tim Pembina
8. Berbagai materi pembinaan statistik sektoral yang dikembangkan sesuai kebutuhan K/L binaan
9. Lembar Kerja (LK) monev mandiri pembinaan statistik sektoral

##### **Output sebagai Sekretariat Tim Pembina Statistik Sektoral**

1. Penetapan lokus pembinaan statistik sektoral melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 200 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Pembinaan Statistik Sektoral pada Badan Pusat Statistik
2. Instrumen pembinaan statistik sektoral, diantaranya:
  - Petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral

- Lembar kerja Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral Sesuai Standar (TPSS)
  - Lembar kerja monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral mandiri
  - Aplikasi Pembinaan Statistik Sektoral/Sistem Pembinaan Statistik Sektoral
  - SOP Pelaksanaan Pembinaan Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik
  - SOP Pengelolaan Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral
3. Terselenggaranya Kick Off Pembinaan Statistik Sektoral
  4. Terlaksananya peningkatan kapasitas tim pembina, diantaranya:
    - Terlaksananya ToT Statistik Sektoral, Juni 2025
    - Terlaksananya ToT Pembinaan Statistik Sektoral, Desember 2025
    - Terlaksananya Esensial #1 Petunjuk Teknis Pembinaan Statistik Sektoral
    - Terlaksananya Esensial #2 Aplikasi dan Monitoring Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral
    - Terlaksananya Esensial #3 Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
    - Terlaksananya Esensial #4 Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembinaan Statistik Sektoral
  5. Hasil penyusunan IKSS Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral sesuai Standar (TPSS)
  6. Hasil penghitungan IKU TPSS triwulanan untuk tim pembina pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
  7. Hasil identifikasi kebutuhan dan penajaman data BPS
  8. Hasil monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral, diantaranya:
    - Hasil verifikasi tim pembina pusat dan provinsi
    - Hasil monev capaian IKU TPSS
    - Hasil monev kualitas isian aplikasi pembinaan
    - Hasil indepth study pembinaan statistik sektoral
    - Hasil evaluasi (feedback) pembinaan statistik sektoral

## **Kendala**

Meskipun pembinaan statistik sektoral telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala yang memerlukan perhatian. Adapun kendala yang dihadapi dalam pembinaan statistik sektoral adalah:

- Perbedaan tingkat pemahaman penyelenggaraan statistik sektoral pada K/L/Pemda.
- Pada periode awal tahun, masih belum ada informasi resmi tentang kejelasan pelaksanaan EPSS 2025, sehingga mempengaruhi substansi pembinaan yang diberikan.
- Pembinaan statistik sektoral merupakan salah satu program Prioritas Nasional, namun juga terkena dampak efisiensi anggaran baik di tingkat pusat, provinsi, dan juga kabupaten/kota.
- Partisipasi produsen data yang belum optimal dalam kegiatan pembinaan.
- Efektivitas pembinaan statistik sektoral lebih optimal apabila dilaksanakan secara luring, sementara pelaksanaan pembinaan luring masih terbatas.

- Keterbatasan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral
- Pemahaman tim pembina terkait penghitungan Indikator TPSS mengingat indikator ini merupakan IKU baru pada 2025.

### **Solusi**

Beberapa solusi yang sudah dilaksanakan dari beberapa kendala yang dihadapi selama 2025 antara lain:

- Melaksanakan pendampingan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga binaan.
- Koordinasi lebih intens dengan Sekretariat EPSS perihal pelaksanaan EPSS
- Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan walidata dan produsen data serta meningkatkan keterlibatan produsen data sejak tahap perencanaan pembinaan.
- Memprioritaskan pembinaan luring untuk materi yang bersifat teknis dan membutuhkan pendampingan intensif. Selebihnya, memanfaatkan media daring untuk pembinaan mengingat keterbatasan anggaran.
- Melibatkan pegawai di tim kerja lainnya untuk membantu dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pembinaan statistik sektoral
- Melakukan internalisasi di tim pembina untuk peningkatan kapasitas tim pembina baik dari sisi substansi materi maupun formulasi dari penghitungan indikator TPSS

### **Rencana Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral bersama Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral, diperoleh beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan pada 2026, antara lain:

1. Koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens terkait EPSS dengan Sekretariat EPSS mengingat tahun 2026 akan dilaksanakan EPSS yang ketiga kalinya
2. Realokasi lokus pembinaan statistik sektoral 2026
3. Pengembangan Sistem Pembinaan Statistik Sektoral
4. Pemutakhiran Petunjuk Teknis Pembinaan Statistik Sektoral
5. Peningkatan kapasitas Tim Pembina Statistik Sektoral melalui berbagai kegiatan seperti:
  - a. Pelatihan Pembinaan Statistik Sektoral 2026
  - b. Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL)
  - c. Rapat koordinasi Tim Pembina Statistik Sektoral
6. Rapat koordinasi pembinaan statistik sektoral dengan seluruh K/L/Pemda
7. Rekalibrasi IKU TPSS dengan menambahkan variabel berupa persentase data statistik sektoral yang disampaikan ke BPS guna mendukung penyediaan data statistik dasar
8. Monitoring dan evaluasi pembinaan statistik sektoral
9. Dalam konteks sebagai tim pembina, menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral sesuai dengan standar petunjuk teknis pembinaan statistik sektoral, yang mencakup persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan monev

## 2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Deputi Bidang MIS melalui Direktorat SIS memberi dukungan dalam penyediaan publikasi/laporan inflasi di antaranya adalah memberikan dukungan sistem pengumpulan data multimoda dalam penyelenggaraan survei terkait inflasi melalui aplikasi FASIH dan IPAS. Penyelenggaraan survei-survei tersebut dikoordinatori oleh Direktorat Statistik Harga. Pengembangan aplikasi untuk kebutuhan Direktorat Statistik Harga, meliputi: SHPB, SHPM, SHKK, SHK, SVEB, dan SHP.

### Output

Capaian realisasi kegiatan pengembangan aplikasi Statistik Harga telah mencapai 100% sesuai dengan IKU Terwujudnya SISNAS. Aktivitas yang dilakukan mencakup:

- Pembahasan hasil perhitungan indeks dari sistem SHPB.
- Pembangunan aplikasi dan briefing Innas SHPM.
- Rilis aplikasi rekon data harga SHKK Provinsi dan Nasional.
- Maintenance survei-survei di HK melalui aplikasi SHK.
- Monitoring surveillance SVPEB melalui aplikasi SVEB
- Troubleshooting permasalahan entry data aplikasi SHP, dst.

### Kendala

Kendala yang dihadapi dalam penyediaan dukungan aplikasi FASIH untuk mengumpulkan data dalam aspek prioritas adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam manajemen survei. Selain itu, pengoperasian FASIH juga terdapat kendala pada saat eksport data, ketidaksesuaian antara FASIH-SM dan FASIH- Dashboard, dan permintaan perpanjangan periode survei dari PJK. Pada operasional aplikasi IPAS untuk pengolahan data yang telah dikumpulkan, terdapat kendala server internal yang bermasalah.

### Solusi

Melakukan manajemen waktu penyelesaian tugas dengan SDM yang ada. Selain itu, kendala dalam pengoperasian FASIH berhasil diatasi melalui diskusi dengan PJK dan melakukan troubleshooting pada kode aplikasi. Pada aplikasi IPAS yang bermasalah pada server internal dilakukan setting untuk memperbaiki kinerja server.

### Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan penambahan dan peningkatan kualitas SDM, sehingga SDM yang ada dapat mengelola aplikasi dan menjadi pendukung dalam pencapaian prioritas nasional, serta perencanaan yang lebih baik di awal tahun kegiatan. Selanjutnya dapat dibuat pedoman atau dokumentasi setting server aplikasi pendukung sehingga pegawai berikutnya yang melakukan setting dapat mengikuti petunjuk yang ada.

## b. Prioritas Presiden

### 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Deputi Bidang MIS berperan penting dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). Direktorat dibawah Deputi Bidang MIS terlibat dalam pembentukan DTSEN.

Direktorat Diseminasi Statistik (DDS), berfungsi sebagai fasilitator dan pintu gerbang utama penerimaan data dari Kementerian/Lembaga (K/L). Data yang telah diterima kemudian diserahkan secara sistematis kepada Direktorat Sistem Informasi Statistik untuk proses teknis lebih lanjut.

Direktorat SIS berperan sebagai unit pengolahan inti dalam pembentukan database DTSEN. Proses ini mencakup: Konsolidasi Database, Membangun fondasi awal DTSEN yang bersumber dari basis data makro seperti Regsosek, DTKS, dan P3KE; Interoperabilitas Data, Melakukan pepadanan (*data matching*) secara ekstensif dengan penyedia data sektoral lainnya, seperti data pelanggan PLN, kepesertaan BPJS, data pemilik kendaraan bermotor, dan data lainnya yang dapat memperkuat DTSEN; Pembersihan Data (Cleansing), Melakukan validasi nomor identitas tunggal melalui pepadanan NIK dengan database Dukcapil guna menjamin akurasi dan integritas data kependudukan.

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) merupakan salah satu pengguna dari database DTSEN yang telah tervalidasi. Data tersebut dimanfaatkan untuk penyusunan dan pemutakhiran kerangka induk (*sampling frame*) untuk berbagai sensus dan survei nasional, analisis metodologi guna mendukung kebutuhan statistik sektoral maupun tujuan strategis lainnya sesuai mandat organisasi.

### **Output**

- Terbentuknya database Awal DTSEN melalui integrasi data 3 (tiga) sumber data DTSEN
- Melakukan pengelolaan DTSEN dengan melakukan:
  - Menerima data dari K/L melalui portal transdata
  - Melakukan verifikasi, validasi dan eksplorasi data dari penyedia sumber data saat proses
  - Melakukan pepadanan sumber data ke dalam DTSEN
  - Melakukan validasi data DTSEN melalui data NIK dengan data NIK dari Kemendagri
  - Melakukan snapshot DTSEN sesuai periode snapshot baik *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS)

### **Kendala**

Proses perpanjangan lisensi Supermap yang sempat tertunda karena masih menunggu clearance. Selain itu pada aktivitas pemenuhan layanan data terkait DTSEN terdapat beberapa kendala, di antaranya menunggu rule perbaikan anomali dari PJK dan belum adanya kebutuhan dashboard DTSEN dari PJK. Aktivitas penerimaan data dari beberapa K/L juga terkendala seperti tidak adanya follow up lanjutan, data belum diterima, dan belum adanya koordinasi dari K/L terkait.

### **Solusi**

Perpanjangan lisensi supermap diatasi dengan percepatan proses clearance sehingga perpanjangan lisensi dapat segera terealisasi. Kendala terkait pemenuhan layanan data DTSEN dengan menghubungi pihak-pihak terkait dan memperoleh kejelasan informasi

#### **Rencana Tindak lanjut**

Pemenuhan kebutuhan aplikasi perlu diidentifikasi dan disampaikan lebih awal. Penyusunan SOP dan melakukan evaluasi secara terus-menerus sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan semakin baik.

### **2. Makan Bergizi Gratis**

#### **Output**

- Tersedianya metodologi sampling dalam pendataan MBG
- Aplikasi FASIH untuk pengumpulan data pemutakhiran, penarikan sampel, dan pencacahan lengkap di lapangan
- Aplikasi SOBAT untuk rekrutmen petugas survei.
- Tersedianya dashboard monitoring pendataan MBG untuk memantau pengumpulan data dan mendeteksi anomali data
- Aplikasi IPAS untuk mendukung penyajian tabulasi serta analisis data

#### **Kendala**

Pada penyediaan dukungan FASIH untuk Survei Dampak MBG, terdapat kendala belum finalnya kuesioner, belum ada rule validasi, perlu pembahasan khusus terkait teknis kegiatan, sementara deadline penyelesaian ditargetkan pada bulan Juni.

#### **Solusi**

Beberapa kegiatan yang statusnya belum final diatasi dengan melakukan koordinasi yang intens dengan PJK untuk memastikan kuesioner, rule validasi, dan lainnya sudah final

#### **Rencana Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah menyepakati jadwal kegiatan hingga rilis data menyesuaikan dengan sumber daya kegiatan yang tersedia sehingga kendala serupa seperti kuesioner yang belum final dapat dihindari.

### **c. Isu Strategis Nasional**

#### **1. UU Nomor 16 Tahun 1997: Sensus Ekonomi**

##### **Output**

- Tersedianya metodologi sensus ekonomi 2026
- Tersedianya prelist keluarga dan prelist usaha dari berbagai sumber data, terutama dari hasil ground check usaha yang masih sedang berlangsung
- Dasar hitung petugas berdasarkan hasil identifikasi estimasi jumlah usaha
- FRS (MFD *online*) untuk menjalankan proses pemutakhiran kerangka wilayah melalui mekanisme yang terstruktur dan bersiklus
- FASIH merupakan salah satu dukungan inti dari Direktorat SIS dalam hal pengumpulan data SE 2026, mulai dari pendesainan kuesioner, pengumpulan

data *multiplatform*, dashboard pendataan dan anomali, hingga pemanfaatan Gen AI dalam hal penentuan KBLI usaha;

- SOBAT merupakan aplikasi pengelolaan mitra statistik dalam berbagai kegiatan sensus/ survei yang mendukung pengelolaan mitra yang terintegrasi, yang berperan strategis pada tahapan rekrutmen, penetapan, dan penugasan petugas
- *Integrated Processing and Analysis System (IPAS)* merupakan platform terpadu untuk pemrosesan dan analisis data.
- Maritemen merupakan aplikasi yang menyediakan kapabilitas layanan secara sistematis dalam menjalankan dan mengelola rangkaian kegiatan manajemen risiko.
- Pelaksanaan Post Enumeration Survei
- Penyiapan diseminasi hasil

#### **Kendala**

- Pengecekan unit usaha dalam ground check tidak dapat di tracking Lokasi usahanya
- Proses bisnis rekrutmen petugas masih belum final
- Penambahan rincian pertanyaan untuk pengecekan oleh PML.
- Hasil feedback uji coba perlu konfirmasi.
- Ditemukan adanya NIK ganda pada *prelist*.
- Penambahan pertanyaan kunjungan untuk kartu kendali.

#### **Solusi**

- Melakukan pengecekan di google map untuk mengetahui Lokasi usaha
- Berkoordinas lebih intens terkait proses bisnis rekrutmen petugas
- Penambahan rincian pertanyaan untuk pengecekan oleh PML dan kunjungan untuk kartu kendali
- Dilakukan pengecekan kembali *prelist* yang nantinya digunakan dalam pendataan SE2026 dengan memastikan tidak adan NIK ganda

#### **Rencana Tindak Lanjut**

- Melakukan uji coba dan pengecekan kebutuhan pendataan melalui diskusi dengan PJK
- Pengembangan aplikasi fasih untuk SE2026, seperti tersedianya aplikasi FASIH berbasis IOS, dan pengembangan lainnya yang perlu dilakukan untuk memperlancar kegiatan di lapangan
- Mempercepat proses pengecekan unit usaha melalui aplikasi matchpro

### **3.4 Prestasi dan Inovasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik**

Prestasi yang telah dicapai dan inovasi yang telah dilakukan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik pada tahun 2024 di antaranya:

1. Badan Pusat Statistik Kembali Meraih Juara 1 Kategori Website di Anugerah Media Humas 2025
2. Badan Pusat Statistik meraih juara 1 dari hasil Pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2025

3. Badan Pusat Statistik dapat mempertahankan ISO 9001:2025 pada Surveillance 1 untuk cakupan The provision of Quality Management Systems for Integrated Statistical Services ni 4 types of services (Library, Statistical Consultation, Sale of Statistical Product, and Recommendation for Statistical Activity)
4. Penilaian IKASANDI untuk Kategori Sistem Elektronik Strategis: FASIH dengan pencapaian:
  - c. Target Nilai Kematangan Siber secara nasional adalah 2.51. BPS mendapatkan nilai kematangan keamanan siber 3.98, yaitu di Level 4 (dari 5) – Terkelola
  - d. Target Nilai Kematangan Persandian secara nasional adalah 2.77. BPS mendapatkan nilai kematangan keamanan siber 2.92, yaitu di Level 3 – Terdefinisi.
5. Pusat Data (*Data Center*) BPS telah mendapatkan sertifikasi desain Pusat Data (TCCD) Tier3 untuk menunjukkan komitmen BPS terhadap standar kelas Pusat Data Dunia serta menjamin keandalan, ketersediaan, dan redundansi layanan Pusat Data BPS.
6. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik meraih juara ketiga dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup BPS
7. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mampu menjadi yang terbaik keenam dalam pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup BPS
8. Direktorat SIS membangun aplikasi SINERGI, efiseinsi proses bisnis dengan melakukan integrasi SIMONEV, AKIP, KIPAPP, dan aplikasi back-office
9. Inovasi yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Register Usaha Tahun 2025 terkait pengembangan aplikasi Matchapro Web yang dapat digunakan sebagai pemutakhiran data SBR yaitu matching data dan profiling oleh BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota. Selain itu, dikembangkan juga aplikasi Matchapro Mobile pada Desember 2025 sebagai pelaksanaan Ground Check Pra-Prelist SE2026.
10. Pembangunan aplikasi berbasis web untuk manajemen pengelolaan usulan penyempurnaan KBLI 2020 (Simpurna-KBLI) serta sistem pengolahan dan translasi ISIC-KBLI (Sibaku-Rev) guna memfasilitasi tim internal dalam proses pemutakhiran KBLI 2020 sampai dengan penyusunan KBLI 2025

### **3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik**

Realisasi dan efisiensi anggaran deputi bidang metodologi dan informasi statistik disajikan pada Tabel 9. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai efisiensinya dimana setiap indikator kinerja Deputi Bidang MIS memiliki nilai efisiensi yang lebih besar atau sama dengan 1. Nilai efisiensi tersebut didapat dari rasio antara Capaian Kinerja dan realisasi anggaran terhadap tahun 2025.

Sasaran 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas

Capaian kinerja indikator Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial mencapai 100 persen, dimana capaian persentase realisasi anggarannya sebesar 99,19 persen. Adapun nilai efisiensi dari indikator kinerja

tersebut  $\geq 1$ , yang berarti bahwa Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial telah menggunakan anggaran secara efisien.

#### Sasaran 2. Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik

Capaian kinerja indikator Tingkat Literasi Pengguna Data BPS mencapai 105% dari target yang ditetapkan sebelumnya, dimana persentase realisasi anggarannya sebesar 83,53 persen. Nilai efisiensi yang didapat dari indikator ini  $\geq 1$ , yang berarti kegiatan untuk pencapaian indikator tersebut telah menggunakan anggaran yang disediakan secara efisien.

#### Sasaran 3. Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik

Capaian kinerja indikator Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik mencapai 102,59 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana persentase realisasi anggarannya sebesar 97,31 persen. Dimana nilai efisiensi yang didapat dari indikator ini  $\geq 1$ , yang berarti kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator tersebut telah menggunakan anggaran yang disediakan secara efisien.

**Tabel 10. Capaian Kinerja, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas								
Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Persen	43,60	43,60	100	489.451.000	485.497.202	99,19	1,008 (Efisien)
Sasaran 2. Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik								
Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	Persen	61,00	64,05	105	30.958.290.000	25.860.687.031	83,53	1,25 (Efisien)
Sasaran 3. Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik								

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Persen	92,00	94,38	102,59	315.402.706.000	306.919.056.129	97,31	1,05 (Efisien)
Total				102,53	346.850.447.000	333.265.240.362	96,08	1,06 (Efisien)

#### Efisiensi Anggaran Secara Keseluruhan

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Deputy Bidang MIS Tahun 2025 sebesar 96,08 persen dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, dengan capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 102,53 persen. Dengan demikian, nilai efisiensi anggaran secara keseluruhan adalah sebesar 1,06, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang MIS pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien.





# BAB IV

---

## Penutup



## 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik merupakan perwujudan kewajiban Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan target kinerja yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan juga merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Pencapaian target Deputy Bidang MIS untuk mendukung visi BPS “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dicerminkan dari keberhasilannya dalam mencapai Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral di tahun 2025, meningkatkan Literasi Pengguna Data BPS, dan meningkatkan Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian target di Tahun 2025. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 102,53 persen selama tahun 2025.

Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta agar mampu memenuhi misi BPS.

## 4.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dapat dilakukan guna peningkatan pada indikator kinerja Deputy Bidang MIS adalah:

1. Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - a. Koordinasi dan kolaborasi dengan Sekretariat EPSS terkait EPSS, mengingat tahun 2026 akan dilaksanakan EPSS yang ketiga kalinya
  - b. Peningkatan kapasitas Tim Pembina Statistik Sektoral melalui berbagai kegiatan seperti: Pelatihan, Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL), dan Rapat koordinasi Tim Pembina Statistik Sektoral.
2. Tingkat Literasi Pengguna Data BPS
  - a. Persentase kegiatan edukasi dan promosi statistik yang terselenggara dengan baik
    1. Merancang media sosial khusus penayangan konten promosi statistik
    2. Menyelenggarakan kegiatan edukasi statistik

- b. Tingkat kepuasan layanan konsultasi statistik
  1. *Sharing knowledge* petugas dengan PJK terkait untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap data yang dihasilkan
  2. *Sharing knowledge* secara berkala dengan BPS Provinsi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi layanan
- c. Persentase pengunjung website yang mengakses publikasi
  1. Pengembangan dan Perbaikan *bugs* Sistem *Website* dan pendukungnya
3. Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik
  - a. Tingkat Ketersediaan Metodologi Kegiatan Statistik yang Terstandar dan Terimplementasikan  
Menyiapkan seluruh permintaan metodologi baik internal maupun eksternal
  - b. Persentase Pengembangan SISNAS
    1. Pengembangan FASIH:
      - Pengembangan iOS untuk pencacah
      - Melanjutkan Fasih PAPI & Web Entry
      - Optimasi dashboard Fasih untuk mendukung SE2026
      - Mengembangkan fitur tracking untuk mendukung SE2026
      - Finishing frontend Fasih SM
      - Mengembangkan fitur untuk menghasilkan perubahan data (delta) saja pada Fasih Form
    2. Pengembangan IPAS:
      - Pengembangan AI-agent IPAS untuk Insight Generator
      - Implementasi IPAS-CM untuk dokumentasi fungsi dan formula yang ada di IPAS-PA
      - Melakukan pengembangan anomaly detection menggunakan unsupervised learning
      - Melakukan penyesuaian resource sesuai dengan load proses di Spark
  - c. Tingkat kepuasan layanan TIK
    1. Launching HaloBPS pada Januari 2026
    2. Legalisasi Maklumat Layanan HaloBPS
    3. Pelaksanaan MoU antara unit kerja yg melakukan kerjasama dg Direktorat SIS dalam penggunaan HaloBPS
    4. Pelatihan PIC tim teknis layanan HaloBPS
    5. Sosialisasi HaloBPS untuk pengguna di BPS Pusat pada Januari 2026



# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Metodologi Dan Informasi Statistik



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat  
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D  
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 19 Februari 2025  
Pihak Pertama

Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat  
NIP. 19710815199312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Kementerian/Lembaga/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	43,60 Persen
2.	Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik	Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	61,00 Persen
3.	Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	92,00 Persen

Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2897   Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	Rp. 8.376.443.000
2)	2900   Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Rp. 2.207.040.000
3)	2901   Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Rp. 7.286.566.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 17.870.049.000</b>

Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar W. S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D  
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 19 Februari 2025  
Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat  
NIP. 19710815199312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ari Nugraha, M.Sc  
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D  
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 23 Oktober 2025  
Pihak Pertama

Moh. Ari Nugraha, M.Sc  
NIP. 19601104198302 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Kementerian/Lembaga/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	43,60 Persen
2.	Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik	Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	61,00 Persen
3.	Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	92,00 Persen

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	2897   Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	Rp.	38.682.740.000
2)	2900   Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Rp.	2.503.209.000
3)	2901   Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Rp.	266.850.800.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>308.036.749.000</b>

Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti, S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D  
NIP. 19720305199903 2 003

Jakarta, 23 Oktober 2025  
Plt. Deputi Bidang Metodologi dan  
Informasi Statistik



Moh. Ari Nugraha, M.Sc  
NIP. 19601104198302 1 001

**Lampiran 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai Aktif	Jumlah Pegawai TB	Jumlah Pegawai CLTN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SMA sederajat	11	0	0
2	Diploma I,II,III	2	0	0
3	DIV/S1	193	7	0
4	S2	120	10	3
5	S3	8	0	0

**Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025**

No	Nama Golongan	Pangkat	Jumlah Pegawai Aktif	Jumlah Pegawai TB	Jumlah Pegawai CLTN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	VII	Golongan VII	1	0	0
2	II/d	Pengatur Tk.1	1	0	0
3	III/a	Penata Muda	55	0	0
4	III/b	Penata Muda Tk.1	66	2	2
5	III/c	Penata	85	6	0
6	III/d	Penata Tk. 1	77	3	2
7	IV/a	Pembina	22	6	0
8	IV/b	Pembina Tk. I	16	0	0
9	IV/c	Pembina Muda	8	0	0
10	IV/d	Pembina Madya	1	0	0
11	IV/e	Pembina Utama	1	0	0

**Lampiran 4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025**

No	Nama Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai Aktif	Jumlah Pegawai TB	Jumlah Pegawai CLTN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Arsiparis Terampil	1	0	0
2	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0
3	Pustakawan Mahir	1	0	0
4	Pustakawan Penyelia	1	0	0
5	Pustakawan Ahli Muda	3	0	0
6	Pranata Komputer Terampil	1	0	0
7	Pranata Komputer Mahir	3	0	0
8	Pranata Komputer Penyelia	4	0	0
9	Pranata Komputer Ahli Pertama	23	0	0
10	Pranata Komputer Ahli Muda	106	0	1
11	Pranata Komputer Ahli Madya	16	0	0
12	Statistisi Ahli Pertama	91	1	1
13	Statistis Ahli Muda	52	3	0
14	Statistisi Ahli Madya	16	0	0
15	Statistisi Ahli Utama	1	0	0

**Lampiran 5. Lokus Pembinaan Statistik Sektorial Tingkat Kementerian  
/Lembaga Tahun 2025**

No (1)	Nama Kementerian/Lembaga (2)	No (3)	Nama Kementerian/Lembaga (4)
1	Badan Informasi Geospasial	26	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	27	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3	Badan Pengawas Obat dan Makanan	28	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	29	Kementerian Kebudayaan
5	Badan Standardisasi Nasional	30	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
6	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	31	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
7	Arsip Nasional Republik Indonesia	32	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
8	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	33	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
9	Kementerian Agama	34	Kementerian Transmigrasi
10	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	35	Kementerian Sosial
11	Lembaga Administrasi Negara	36	Kepolisian Negara Republik Indonesia
12	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	37	Komisi Pemberantasan Korupsi
13	Badan Intelijen Negara	38	Badan Keamanan Laut
14	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	39	Badan Pangan Nasional
15	Badan Pengawas Pemilihan Umum	40	Badan Pemeriksa Keuangan
16	Badan Siber dan Sandi Negara	41	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
17	Kementerian Pertahanan	42	Kementerian Pertanian
18	Ombudsman Republik Indonesia	43	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
19	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	44	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
20	Kementerian Dalam Negeri	45	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
21	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	46	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
22	Kementerian Ketenagakerjaan	47	Kementerian Kehutanan
23	Kementerian Luar Negeri	48	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
24	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	49	Kementerian Kelautan dan Perikanan
25	Kementerian Kesehatan	50	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

## Lanjutan

No	Nama Kementerian/Lembaga	No	Nama Kementerian/Lembaga
(1)	(2)	(3)	(4)
51	Badan Pengusahaan Batam/Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	72	Kementerian Komunikasi dan Digital
52	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	73	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
53	Kementerian Pekerjaan Umum	74	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
54	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	75	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
55	Kementerian Perindustrian	76	Komisi Pemilihan Umum
56	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	77	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
57	Badan Narkotika Nasional	78	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
58	Kementerian Keuangan	79	Mahkamah Agung Republik Indonesia
59	Kementerian Koperasi	80	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
60	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	81	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
61	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	82	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
62	Kementerian Perhubungan	83	Kementerian Pemuda dan Olahraga
63	Badan Kepegawaian Negara	84	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
64	Badan Riset dan Inovasi Nasional	85	Kementerian Sekretariat Negara
65	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	86	Kementerian Hak Asasi Manusia
66	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	87	Kementerian Hukum
67	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	88	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
68	Kementerian Perdagangan	89	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
69	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	90	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
70	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	91	Komisi Yudisial Republik Indonesia
71	Kementerian Pariwisata		

Lampiran 6. Daftar Prestasi/Penghargaan Unit Kerja Menurut Unit Kerja/Satuan Kerja Tahun 2025



**HASIL VERIFIKASI KEMATANGAN KEAMANAN SIBER**

Tingkat Kematangan Keamanan Siber Kategori SE: Strategis	2025				Kategori Tingkat Kematangan Keamanan Siber
	Tingkat Nilai Kematangan	Nilai Kematangan	Nilai Kematangan per Dimensi	Kategori Tingkat Kematangan per Dimensi	
<b>Total</b>	<b>2,51</b>	<b>3,98</b>			<b>Level 4 - Terkelola</b>
Kepercayaan Pihak dan Mitra dalam Platform	0,25	0,25			
Mitigasi Risiko, Mitigasi, dan Pemulihan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan Sistem	0,25	0,25	0,25	Level 4 - Terkelola	
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			
Kelembutan dan Kelembutan Sistem	0,25	0,25			

BADAN SIBER DAN SANDI-NEGARA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI  
 KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH  
 TAHUN 2025

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

**A. KEMENTERIAN / LEMBAGA**

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Badan Pusat Statistik	4.92	A
2	Kementerian Keuangan	4.87	A
3	Kementerian Kesehatan	4.87	A
4	Kejaksaan Agung	4.85	A
5	Kementerian Komunikasi dan Digital	4.80	A
6	Tentara Nasional Indonesia	4.80	A
7	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	4.80	A
8	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	4.80	A
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.80	A





**Recommendation Letter**

272/LTR/OPR/CBQA/2025

On behalf of CBQA Global We would like to inform that :

**Direktorat Diseminasi Statistik – Badan Pusat Statistik**

Office Address :

Jl. Dr. Soetomo 6-8 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, 17010, Indonesia

Has completed the audits of Surveillance 1 on 4<sup>th</sup>-5<sup>th</sup> June 2025 for Certification to ISO 9001:2015 standard.

for the scope of:

The provision of Quality Management Systems for Integrated Statistical Services in 4 types of services (Library, Statistical Consultation, Sale of Statistical Product, and Recommendation for Statistical Activity

The result indicated that at the time of assessment there was significant compliance with the audit criteria. Based on this, we have made recommendation to continuance of Certification.

Issued By: Rudy Hendarto  
Technical Manager

Issued date: 6<sup>th</sup> June 2025

Signature: 

**Badan Pusat Statistik Kembali Meraih Juara 1 Kategori Website di Anugerah Media Humas 2025, Buktikan Keunggulan Platform Digital!**



Jakarta, 12 November 2025

**BPS Kembali Meraih Juara 1 Kategori Website pada AMH 2025**

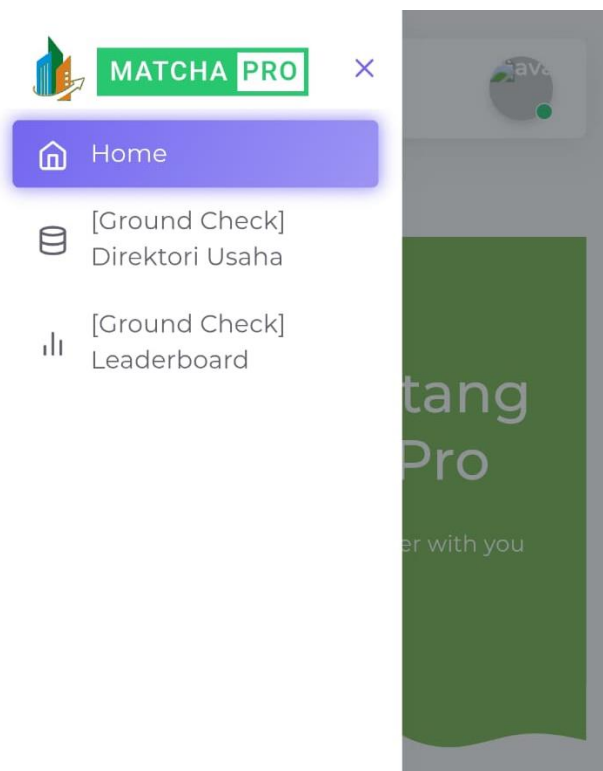
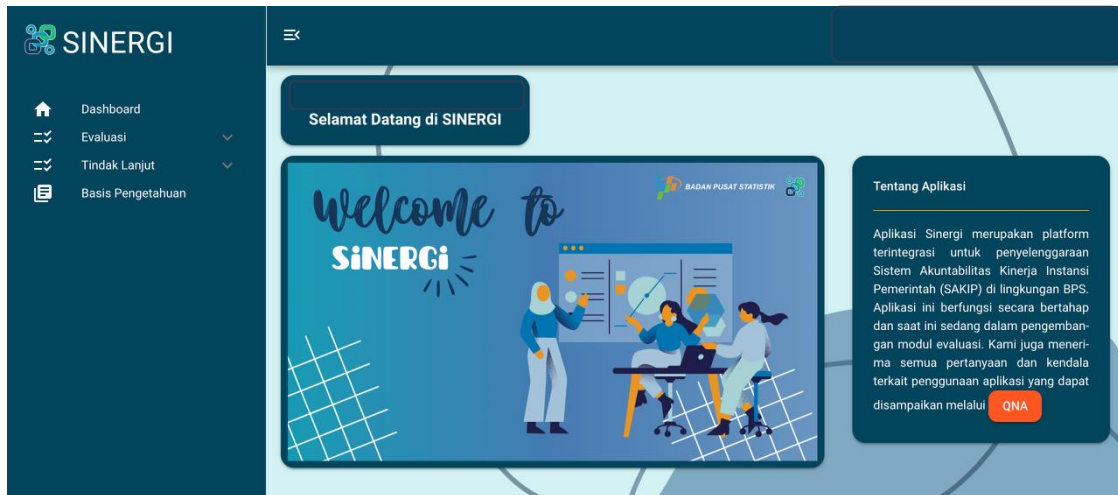
Anugerah Media Humas (AMH) adalah ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada lembaga pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, maupun pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas kehumasan dalam menyampaikan informasi kepada publik serta mendorong inovasi dalam tata kelola komunikasi publik.

Pada AMH 2025, sebanyak 190 instansi berpartisipasi dalam berbagai kategori. Penilaian untuk kategori website dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain estetika, navigasi dan aksesibilitas, kualitas konten, konsistensi pembaruan, performa, serta sebaran (eksposur).

Tahun ini, penghargaan yang diraih BPS menjadi pencapaian kedua kalinya secara berturut-turut setelah tahun lalu juga meraih juara pertama dalam kategori yang sama. Hal ini menegaskan bahwa BPS terus berkomitmen untuk memperbaiki kualitas website dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam mengakses informasi statistik yang akurat dan up-to-date.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan, seluruh stakeholder, Direktorat Diseminasi Statistik, Direktorat Sistem Informasi Statistik dan PJK yang telah mendukung serta berperan aktif dalam meraih penghargaan

## Lampiran 7. Daftar Inovasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025



## Lampiran 8. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang Berkualitas							
Persentase K/L/Pemda yang Berpredikat Minimal Baik dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	43,60	43,60	100	Rp.489.451.000	Rp.485.497.202	99,19%
Sasaran 2. Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik							
Tingkat Literasi Pengguna Data BPS	Persen	61,00	64,05	105	Rp.30.958.290.000	Rp.25.860.687.031	83,53%
Sasaran 3. Terwujudnya Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik							
Tingkat Pengembangan Metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Proses Bisnis Statistik	Persen	92,00	94,38	102,59	Rp.315.402.706.000	Rp.306.919.056.129	97,31%
<b>Total</b>				<b>102,53</b>	<b>Rp.346.850.447.000</b>	<b>Rp.333.265.240.362</b>	<b>96,08%</b>



SENSUS  
EKONOMI  
2026

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id>. E-mail: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)